



## KAPAL PESIAR PERTAMA 2024 PELABUHAN BENOA

Wisatawan mancanegara yang menumpang kapal pesiar Norwegian Jewel turun dari kapal setibanya di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Senin (1/1). Kapal pesiar berbendera Bahama yang mengangkut sekitar 2.350 penumpang dan 1.033 orang kru tersebut menjadi kapal pesiar pertama yang bersandar di Pelabuhan Benoa pada tahun 2024.

# PNBP BPH Migas Capai Rp1,3 T

Erika Retnowati menyebutkan, BPH Migas telah berupaya untuk mencatatkan realisasi tersebut melalui berbagai upaya dan tetap memerhatikan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

**JAKARTA (IM)** - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatatkan realisasi Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi dari target yang dicantumkan pada tahun 2023, yakni Rp1,393 triliun.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, capaian tersebut melebihi dari target yang diusung sebesar Rp864,42 miliar. "Penerimaan PNBP Migas yang berasal dari iuran badan usaha mencapai 161,26% dari target tahun 2023," jelas Erika dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (1/1).

PNBP BPH Migas tersebut berada dalam tren meningkat apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 tercatat PNBP BPH Migas sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2022, PNBP yang disetor ke kas negara sebesar Rp1,309 triliun.

Dijelaskan Erika, untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di

daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), sepanjang tahun 2023 BPH Migas juga telah mendorong dibangunnya 89 penyalur BBM Satu Harga. "Secara kumulatif, sejak tahun 2017 hingga kini telah terbangun 512 penyalur BBM Satu Harga," imbuhnya.

Sementara itu, realisasi anggaran BPH Migas tahun 2023 sebesar Rp229,8 miliar, atau mencatatkan persentase sebesar 99,51% dari pagu anggaran Rp230,92 miliar.

Erika menyebutkan, BPH Migas telah berupaya untuk mencatatkan realisasi tersebut melalui berbagai upaya dan tetap memerhatikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. "Antara lain melalui percepatan pelaksanaan tender, akselerasi penyelesaian dokumen pertanggungjawaban dinas, serta monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan anggaran BPH Migas," tuturnya.

BPH Migas juga mencatat penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar tahun 2023 melebihi kuota. Penyaluran

solar tercatat 102,69% dari kuota 2023.

Erika Retnowati menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah pada bidang pengawasan dalam penyaluran BBM. BPH Migas melakukan verifikasi terhadap volume penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penuasan (JBKP).

"BPH Migas melakukan verifikasi secara berkala, baik setiap bulan maupun secara triwulanan terhadap volume penyaluran JBT dan JBKP," kata Erika.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan hingga November 2023, kata Erika, BPH Migas

telah mengoreksi volume JBT Minyak Solar sebesar 6.172,547 kiloliter. Dari jumlah tersebut, koreksi volume terbesar berada pada sektor transportasi darat sebesar 6.027,07 kiloliter.

"Kemudian sektor transportasi laut sebesar 112,477 kiloliter, sektor perikanan sebesar 21,5 kiloliter, sektor layanan umum sebesar 10 kiloliter, dan sektor kereta api sebesar 1,5 kiloliter," paparnya.

Pada tahun 2024 pemerintah telah mengantisipasi pendistribusian JBT minyak solar dengan meningkatkan kuota menjadi sebesar 19 juta kiloliter. Selain itu, pen-

awasan JBT minyak solar juga dilakukan dengan menggunakan tools berupa barcode sehingga lebih terkontrol konsumsinya.

"Jadi artinya 2 juta kiloliter lebih banyak daripada 2023, tapi bukan berarti kita akan menghabiskan semua, enggak gitu ya. Artinya kita berupaya agar pertumbuhan itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya meskipun itu nanti ada Pemilu tapi kita prediksi tidak terlalu melonjak begitu ya dengan adanya pengendalian dan pengawasan di lapangan," ujar Erika. • pan

## BKPM Terbitkan Lebih dari 7 Juta NIB, Mayoritas Usaha Mikro dan Kecil

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 7.146.105 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Komposisinya terdiri dari usaha mikro sebanyak 6.887.479, usaha kecil sebanyak 187.402 NIB, usaha menengah sebanyak 23.350 NIB, dan sebanyak 47.874 usaha besar.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa pun mengapresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang telah melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko. Sistem ini merupakan implementasi UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan berusaha.

Dengan banyaknya yang mengurus NIB ini, pihaknya mendapat masukan dari pelaku usaha untuk lebih menyempurnakan sistem OSS agar semakin user friendly.

"Terima kasih kepada pelaku usaha Indonesia yang sangat kooperatif. Pengurusan NIB yang sepenuhnya online ini tidak bisa berjalan tanpa kesedi-

aan dan pemahaman para pelaku usaha. Para pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) yang sangat mendominasi dalam penerbitan NIB ini betul-betul luar biasa," kata Tina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/12).

Lebih lanjut, jumlah NIB yang diterbitkan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 ini. Tercatat lebih dari 2 juta NIB terbit sejak perincatan 2 tahun sistem OSS berbasis risiko pada bulan Agustus 2023 lalu.

Sebagai perbandingan, kata Tina, sepanjang tahun 2022 sistem OSS menerbitkan sebanyak 2.461.775 NIB. Artinya, dalam 5 bulan terakhir bisa hampir menyamai penerbitan NIB tahun 2022.

"Pencapaian ini kami maknai sebagai bentuk kesadaran pelaku usaha untuk menjadi formal dan merupakan suatu bentuk peningkatan kepercayaan kepada pemerintah. Selama tersedia koneksi internet, pelaku usaha bisa mengurus NIB dari mana-pun mereka berada, tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk

bertemu banyak petugas dan banyak meja," jelasnya.

Tina juga tidak memungkir bahwa layanan konsultasi, baik tatap muka maupun digital, selalu dibutuhkan. Hal ini untuk membantu penanaman pertanyaan dan/atau hambatan teknis yang ditemui pelaku usaha.

Sampai dengan 29 Desember 2023, lima provinsi dengan penerbitan NIB terbanyak adalah Jawa Barat yang mencapai 1.276.268 NIB, disusul Jawa Timur dengan jumlah terbit NIB sebanyak 1.101.689 NIB. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 835.287 NIB, DKI Jakarta sebanyak 596.518 NIB, dan Banten sebanyak 347.456 NIB.

"Saat ini OSS menerbitkan rata-rata 13 sampai 15 ribu NIB setiap hari. Bahkan di waktu tertentu bisa lebih dari 50 ribu NIB dalam sehari. Sementara itu contact center biasanya menerima sekitar 500 panggilan telepon, seribu pesan WhatsApp, dan seribu email per hari. Artinya kira-kira 15 persen dari total NIB yang terbit. Jadi sebenarnya sebagian besar pelaku usaha bisa memproses mandiri hingga NIB-nya terbit," kata Tina. • hen

## Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkeu Kawal Pelaksanaan APBN

**JAKARTA (IM)** - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, yang terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 secara baik. Hal tersebut Menkeu sampaikan dalam acara Tutup Kas Tahun Anggaran 2023 di Jakarta pada Jumat (29/12) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan APBN bukanlah sebuah dokumen yang bersifat statis. Terdapat pos-pos dan komponen yang bergerak mengikuti dinamika perekonomian.

"Sehingga memang kemampuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN itu agar tetap bisa kredibel, sustainable, dan reliable itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia," kata Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (1/1).

Menurutnya, APBN tidak bisa dipisahkan dari gerak perekonomian. Sebagai bendahara negara, Kemenkeu harus mampu membaca gerak ekonomi secara keseluruhan sehingga mampu mendesain APBN dengan baik.

"Itulah yang mungkin perlu untuk kita semuanya di Kementerian Keuangan dan khususnya untuk Ditjen Perbendaharaan di dalam meningkatkan kemampuan di dalam meng-connect antara penge-

lolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, ia meminta Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan benchmark dengan berbagai institusi, baik institusi perbankan maupun Kementerian Keuangan negara-negara yang lain.

"Selain itu, DJPB dapat terus coba untuk memperdalam dari sisi fungsi treasury kita dengan seluruh Kementerian Keuangan unit terkait, dari sisi instrumen keuangan, dan juga hubungan kita dengan Bank Indonesia, serta dengan sektor keuangan secara keseluruhan, seperti OJK dan bahkan LPS. Kerja sama kita dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting," urainya.

Lebih jauh ia menyampaikan terima kasih atas upaya Ditjen Perbendaharaan yang terus melakukan dan menguatkan regional economist di berbagai daerah di Indonesia.

"Karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan apa yang disebut demokrasi yang sehat. Bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN #UangKita. Itu adalah untuk anak-anak dan untuk seluruh bangsa Indonesia sehingga mereka bisa menghargai bagaimana sebuah pengelolaan keuangan negara itu dilakukan," tandas Sri Mulyani. • dro



**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 MENGALAMI PENURUNAN** Pekerja membongkar tiang lampu di Monas, Jakarta, Senin (1/1/2024). Kementerian Tenaga Kerja mencatat perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3 mengalami penurunan 14%, di mana pada 2022 tercatat 2.004 perusahaan yang menerapkan, turun menjadi 1.749 perusahaan di tahun 2023.



## Satgas BLBI Diperpanjang hingga Desember 2024

**JAKARTA (IM)** - Masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya hingga 31 Desember 2024.

Kebijakan ini diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023.

Keputusan Presiden ini sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI sampai 31 Desember 2023.

Sampai akhir tahun ini, ada total estimasi aset Rp35,1 triliun yang berhasil diperoleh Satgas BLBI. Total aset yang berhasil dikuasai seluas 43,54 ribu meter persegi. Dengan memperhitungkan target Satgas BLBI sebesar Rp110,454 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%.

"Hingga akhir tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perole-

han aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp35,196 triliun, di antaranya berupa penyetoran PNBP dari obligor debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN Pemda," ujar Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangannya, Minggu (31/12).

Rionald memaparkan perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

"Selain itu, kolaborasi antar instansi yang tergabung dalam Satgas BLBI telah terbangun dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung penyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan," ujar Rionald. • hen

## Realisasi Ekspor Produk Hasil Hutan 128,5 Persen dari Target

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan realisasi ekspor produk hasil hutan pada 2023 mencapai 128,5 persen dari target yang ditetapkan.

Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Agus Justianto mengungkapkan KLHK menargetkan ekspor produk hasil hutan pada tahun 2023 sebesar 10 miliar dolar AS.

"Realisasinya hingga pertengahan Desember sudah mencapai 12,85 miliar dolar AS atau 128,5 persen dari target," kata Agus Justianto melalui keterangan tertulis di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (1/1).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan, lanjutnya, adalah adanya kendala Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Menurut dia, sistem tersebut telah mendapat kepercayaan global untuk menjamin produk kayu yang dibeli bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari.

Hal ini juga dibuktikan Indonesia menempati ranking tertinggi pada Global Timber Index (GTI), platform yang mempromosikan perdagangan kayu legal dan berkelanjutan yang dipublikasikan oleh Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO).

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Krisdianto menambahkan re-branding dan penguatan SVLK sangat strategis

ketika isu legalitas dan kelestarian produk kayu semakin menjadi perhatian dunia.

Dikatakannya banyak negara yang kini membuat regulasi untuk memastikan produk kayu yang masuk bersumber dari pengelolaan hutan lestari dan bukan dari deforestasi.

Setelah Uni Eropa memberlakukan ketentuan anti deforestasi (EUDR), kini tren regulasi bebas deforestasi juga muncul di pasar-pasar kunci. Di antaranya di Amerika Serikat dengan US Forest Act 2023, Inggris (UK Forest Risk Commodities), dan Jepang (Japan Clean Wood Act).

Untuk menghadapi tren tersebut, kata Krisdianto, penguatan SVLK terus dilakukan. Saat ini SVLK telah dilengkapi dengan kriteria dan indikator sesuai tuntutan pasar global, salah satunya adalah keterlacakan melalui penyampaian titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan dan pemasaran produk kayu (geo-lokasi). "Untuk semakin memperkuat legalitas dan keterlacakan bahan baku kayu, dilakukan interkoneksi sistem informasi," ujarnya.

Menurut dia, untuk meningkatkan keberterimaan SVLK kampanye positif SVLK dan soft diplomacy juga dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional. "Selain untuk pasar-pasar kunci seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, SVLK juga menjadi bekal untuk Indonesia membuka akses pasar baru," katanya. • dot